

Nomor : B/488/PP.02/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 3 (tiga) Berkas  
Hal : **Penyampaian Hasil Pemetaan Tingkat  
Kematangan Hub JIPP Tahun 2025**

24 Desember 2025

Yth.

**DAFTAR TERLAMPIR**

di

Tempat

Berkenaan dengan surat kami:

1. Nomor B/371/PP.00.05/2025, tanggal 6 Oktober 2025, Hal: Pengisian Kertas Kerja dan Bukti Dukung Pemetaan Tingkat Kematangan Hub JIPP;
2. Nomor B/426/PP.00.05/2025, tanggal 29 Oktober 2025, Hal: Penyampaian Tindak Lanjut Verifikasi Data Pemetaan Tingkat Kematangan Hub JIPP; serta
3. Nomor B/434/PP.00.05/2025, tanggal 4 November 2025, Hal: Penyampaian Tindak Lanjut Verifikasi Data Pemetaan Tingkat Kematangan Hub JIPP Batch 2;

bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 28 November 2025, kami telah menerima isian kertas kerja beserta bukti dukung, dan seluruh dokumen dimaksud telah dilakukan proses revidi dan penilaian.
2. Hasil penilaian Pemetaan Tingkat Kematangan Hub JIPP tersebut dikonversikan ke dalam angka dan kategori tingkat kematangan, yaitu: nilai 1,00-1,50 (Kategori Awal), nilai 1,51-2,50 (Kategori Dasar), nilai 2,51-3,50 (Kategori Menengah), 3,51-4,50 (Kategori Mahir) dan nilai 4,51-5,00 (Kategori Unggul).
3. Selanjutnya, untuk catatan/rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan pengoptimalan peran serta kinerja Hub JIPP, kami tuangkan dalam bentuk Hasil Pemetaan Tingkat Kematangan Hub JIPP sebagaimana lampiran 2.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan komitmen, perhatian, dan dukungan pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemetaan dimaksud, dalam bentuk:
  - a. Penguatan peran, fungsi, dan tata kelola Hub JIPP, termasuk integrasinya dalam kebijakan internal dan rencana kerja instansi; dan
  - b. Optimalisasi Hub JIPP sebagai simpul pengelolaan pengetahuan dan inovasi pelayanan publik guna mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan kinerja pelayanan publik.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251223HGJI
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di [lapor.go.id](http://lapor.go.id).



5. Bagi instansi yang tidak melakukan pengisian kertas kerja sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana angka 1, maka Hub JIPP instansi Bapak/Ibu tidak termasuk dalam Hasil Pemetaan Tingkat Kematangan Hub JIPP Tahun 2025, dan dinyatakan dengan status *Not Available* (NA). Kami berharap Bapak/Ibu dapat memberikan perhatian dan komitmen yang lebih tinggi untuk mendorong penguatan peran dan fungsi Hub JIPP, mengingat pemetaan tingkat kematangan Hub JIPP merupakan instrumen strategis dalam menilai kesiapan kelembagaan, tata kelola, serta keberlanjutan ekosistem inovasi pelayanan publik.

Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi PIC yang telah ditentukan sebagaimana lampiran 3.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**OTOK KUSWANDARU**

Deputi Bidang Pelayanan Publik

NIP. 196906191995031001

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251223HGJI
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di [lapor.go.id](http://lapor.go.id).



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

**DAFTAR PENERIMA SURAT**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
10. Sekretaris Mahkamah Agung
11. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung
12. Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kepolisian RI
13. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
14. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
16. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Aceh
17. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
18. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
19. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
20. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
21. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau
22. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi
23. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung
24. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu
25. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
26. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten
27. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
28. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

29. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
30. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta
31. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
32. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali
33. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
34. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
35. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
36. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
37. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
38. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
39. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
40. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
41. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
42. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
43. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
44. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
45. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo
46. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku
47. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara
48. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua
49. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat
50. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
51. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Selatan

HASIL PEMETAAN TINGKAT KEMATANGAN HUB JIPP TAHUN 2025				
Nama Instansi	Provinsi Gorontalo			
Nama PIC Hub JIPP	Tity Iriani Datau			
Link Bukti Dukung	(Misal: <a href="https://googledrive">https://googledrive</a> )			
Nilai/ Kategori	3,12/ Menengah			
Aspek	Indikator Pertanyaan	Uraian oleh Hub JIPP	Catatan oleh Verifikator	Nilai
		<i>Diisi oleh Hub JIPP</i>	<i>Diisi oleh Tim KemenPANRB</i>	<i>Diisi oleh Tim</i>
1. Perencanaan	1a. Apakah Hub JIPP memiliki database inovasi?	Saat ini database inovasi daerah untuk versi digital baik inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya disimpan dalam aplikasi Innovation Government Award (IGA) BSKDN Kemendagri RI dan Format Exel dapat di Download dan di Masukkan dalam Website Rumah Inovasi Gorontalo Milik Bappeda Provinsi Gorontalo dan dapat di akses pada : <a href="https://bappeda.gorontaloprov.go.id/rinovgo/inovasi-dan-policy-brief/infografis-inovasi">https://bappeda.gorontaloprov.go.id/rinovgo/inovasi-dan-policy-brief/infografis-inovasi</a>	- Bukti dukung dapat dilengkapi dengan excel dari aplikasi IGA sebagaimana dimaksud pada uraian. - Website Rumah Inovasi baru operasional 1 tahun, sehingga jumlah inovasi yang diinput masih terbatas. - Agar tetap memiliki data excel atau menambahkan konten pada website Rumah Inovasi dengan judul inovasi, tahun penciptaan inovasi 5 tahun terakhir, inovator, unit pelaksana inovasi, deskripsi singkat inovasi, status keberlanjutan, penghargaan yang diperoleh setiap inovasi, keterangan apakah inovasi tersebut sudah direplikasi/scaling up serta melakukan monitong secara berkala => pengembangan aplikasi.	3
	1b. Apakah Hub JIPP melibatkan stakeholders terkait dalam proses inovasi (Perencanaan, Implementasi, Pengembangan, Pelembagaan, Penyebarluasan dan Evaluasi)?  Stakeholders: 1. Pemerintah 2. Akademisi 3. Swasta 4. Masyarakat 5. Media 6. Komunitas/LSM/NGO	Melibatkan Pemerintah, Akademisi dan Media dalam forum Rumah Inovasi Gorontalo yang selalu dipublikasikan dalam website : <a href="https://bappeda.gorontaloprov.go.id/rinovgo/berita/berita?id=2">https://bappeda.gorontaloprov.go.id/rinovgo/berita/berita?id=2</a>	Pada profil website telah menyebutkan bahwa stakeholders terdiri dari Gubernur, DPRD, BSKDN Kemendagri RI, Tim JIPPNAS Kemenpan RB, PPM/Pusat Inovasi Perguruan Tinggi, dan OPD Lingkup Pemprov Gorontalo yang mana memenuhi 2 unsur pelibatan yaitu Pemerintah dan Akademisi. => Pelibatan stakeholders dalam pelaksanaan kegiatan inovasi agar terus dipertahankan dengan baik dan diperluas sesuai kebutuhan.	3
	1c. Apakah Hub JIPP memfasilitasi atau menyelenggarakan KIPP pelayanan publik di tingkat instansi (level internal)?	HUB Inovasi Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2025 dikoordinir oleh Bidang Riset dan Inovasi Bappeda Provinsi Gorontalo telah melaksanakan pendampingan terkait keikutsertaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Kompetisi internal pernah dilakukan pada tahun 2023, dan rencana akan dilakukan lagi pada November 2025. => Kegiatan kompetisi atau lomba inovasi yang telah berjalan agar dipertahankan dan terus ditingkatkan, serta disesuaikan dengan kebutuhan publik.	3
2. Pelembagaan	2a. Apakah Hub JIPP telah memiliki dukungan dasar hukum penyelenggaraan, tim pengelola, mekanisme kerja, dan mekanisme evaluasi yang telah ditetapkan secara formal untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaannya?  Unsur pemenuhan tersebut sebagai berikut: 1. Dasar hukum penyelenggaraan Hub JIPP 2. Tim Pengelola 3. Mekanisme kerja 4. Mekanisme evaluasi	Dalam Pelaksanaan Inovasi Daerah termasuk Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Gorontalo Telah menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 25 Tahun 2023 yang telah memuat mengenai Dasar Penyelenggaraan, Tim Pengelola, Mekanisme Kerja dan Mekanisme Evaluasi serta Pemberian Penghargaan Kepada Inovator terbaik. Dan Hal ini juga di optimalkan dengan Surat Edaran Gubernur mengenai Kewajiban Pelaporan Inovasi Daerah oleh Pimpinan OPD. Selain itu pada Bidang Riset dan Inovasi Bappeda Provinsi juga dibentuk Tim Rumah Inovasi Gorontalo yang juga membuat Website Rumah Inovasi yang diharapkan menjadi Hub Sharing Knowledge dan Praktik baik hasil-hasil riset dan inovasi di lingkup pemprov gorontalo dapat di akses oleh masyarakat dan stakeholder terkait  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_ORxpg95bYI9jgCbuRnIX1sDJQP16F0S">https://drive.google.com/drive/folders/1_ORxpg95bYI9jgCbuRnIX1sDJQP16F0S</a>	Telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 yang memuat tugas dan fungsi dari Bidang Riset dan Inovasi dibawah BAPPEDA Gorontalo, mekanisme kerja dan mekanisme evaluasi. Selain itu, juga memiliki SK tim pengelola fasilitasi dan pendampingan pelaporan inovasi daerah beserta tugasnya. => Dukungan yang telah disediakan agar dipertahankan dan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan serta kondisi yang dihadapi.	5
	2b. Apakah SDM tim pengelola Hub JIPP telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi atau kapasitas di bidang inovasi pelayanan publik?	Tahun 2025 Telah dilaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis penulisan Proposal Inovasi bagi Inovasi Pelayanan Publik yang memenuhi persyaratan mengikuti KIPP. Namun untuk Tahun sebelumnya juga telah dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_ORxpg95bYI9jgCbuRnIX1sDJQP16F0S">https://drive.google.com/drive/folders/1_ORxpg95bYI9jgCbuRnIX1sDJQP16F0S</a>	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Pengelola Hub JIPP agar dipertahankan dan ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan internal dan atau eksternal sesuai kebutuhan.	3

## HASIL PEMETAAN TINGKAT KEMATANGAN HUB JIPP TAHUN 2025

Nama Instansi	Provinsi Gorontalo			
Nama PIC Hub JIPP	Tity Iriani Datau			
Link Bukti Dukung	(Misal: <a href="https://googledrive">https://googledrive</a> )			
Nilai/ Kategori	3, 12/ Menengah			
Aspek	Indikator Pertanyaan	Uraian oleh Hub JIPP	Catatan oleh Verifikator	Nilai
	<b>2c. Apakah tersedia dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan Hub JIPP?</b>  Penggangan dalam kegiatan hub meliputi: 1. Pendampingan proses penciptaan inovasi; 2. KIPP internal; 3. Replikasi; 4. Peningkatan kapasitas SDM; 5. Kegiatan monev; 6. Studi tiru; dan 7. Kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan hub	Melalui Bidang Riset dan Inovasi tersedia anggaran yang dapat memfilitasi kegiatan inovasi walaupun tidak begitu memadai seperti : Peningkatan Kapasitas SDM melalui bimtek penyusunan proposal KIPP dan pemenuhan indikator IGA serta updating Website Rumah Inovasi Gorontalo, Pendampingan penulisan dan penginputan dalam aplikasi inovasi, Kompetisi Inovasi Tingkat Provinsi dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inovasi OPD  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_ORxpg95bYI9jgCbuRnIX1sDJQP16F0S">https://drive.google.com/drive/folders/1_ORxpg95bYI9jgCbuRnIX1sDJQP16F0S</a>	Dukungan anggaran kegiatan yang telah disediakan agar dipertahankan dan ditingkatkan sesuai kebutuhan.	3
3. Penyebarluasan	<b>3a. Apakah ada inovasi yang difasilitasi dan berhasil direplikasi melalui Hub JIPP?</b>	Salah satu inovasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yaitu Cegah Stunting Bersama BESTI adalah replikasi inovasi dari daerah lainnya yang tahun ini telah diikutkan dalam KIPP 2025 dan lolos sampai ke tahapan Finalis TOP Inovasi Pelayanan Publik  <a href="https://www.instagram.com/reel/DMbhe91SM1a/?igsh=a3JqbXcxd2NteDYy">https://www.instagram.com/reel/DMbhe91SM1a/?igsh=a3JqbXcxd2NteDYy</a>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IbXkhsG-Eh4GD_n5dPI6D8z_GLWK5PCI">https://drive.google.com/drive/folders/1IbXkhsG-Eh4GD_n5dPI6D8z_GLWK5PCI</a>	Pengelola Hub JIPP agar terus memfasilitasi proses pelaksanaan replikasi dan dilakukan pemantauan.	3
	<b>3b. Apakah Hub JIPP memfasilitasi transfer/penyebarluasan inovasi?</b>  Kegiatan fasilitasi: 1. Sosialisai Inovasi (seminar, workshop) 2. Bimtek (pelatihan teknis dan manajemen) 3. Diseminasi inovasi (pameran, sharing session, publikasi) 4. Benchmarking pada inovasi yang telah mendapatkan penghargaan 5. Replikasi 6. Scaling Up Regional/Nasional	Pemerintah Provinsi Gorontalo memfasilitasi Penyebarluasan Informasi melalui Bimtek, Sosialisasi Inovasi ke kabupaten/kota, dan Publikasi pada Website Rumah Inovasi Gorontalo  <a href="https://bappeda.gorontaloprov.go.id/rinovgo/berita/video">https://bappeda.gorontaloprov.go.id/rinovgo/berita/video</a>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IbXkhsG-Eh4GD_n5dPI6D8z_GLWK5PCI">https://drive.google.com/drive/folders/1IbXkhsG-Eh4GD_n5dPI6D8z_GLWK5PCI</a>	Fasilitasi terhadap penyebarluasan dan transfer pengetahuan inovasi yang telah dilaksanakan agar dipertahankan dan ditingkatkan sesuai kebutuhan	3
4. Evaluasi	<b>4a. Apakah Hub JIPP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi yang difasilitasi, termasuk mengevaluasi keberlanjutan dan kepuasan pengguna layanan?</b>  Kondisi yang dipenuhi: 1. Memiliki jadwal evaluasi 2. Memiliki dokumentasi kegiatan dan capaian Hub JIPP. 3. Memeriksa keberlanjutan inovasi 4. Merekap hasil survei kepuasan pengguna atas pelaksanaan inovasi	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Provinsi Gorontalo dilakukan melalui Pemantauan pada Website Indeks Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kemendagri karena merupakan salah satu indikator inovasi penting dalam rangka menjamin kemanfaatan dan keberlanjutan Inovasi namun masih dalam tahapam mendokumentasikan dan memeriksa pelaksanaan dan keberlanjutan inovasi  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qlgP9gcMB6QoIAWmGoLayS-mZ3nXrDm7">https://drive.google.com/drive/folders/1qlgP9gcMB6QoIAWmGoLayS-mZ3nXrDm7</a>	Sudah ada bukti dukung berupa dokumentasi pelaksanaan monev, data inovasi tahun 2025 dan SK Tim Penilai inovasi. => Dapat dilengkapi dengan jadwal evaluasi, dokumentasi kegiatan lainnya, laporan keberlanjutan inovasi, hasil survei kepuasan pengguna atas pelaksanaan inovasi atau bukti dukung lain yang relevan.	2
	<b>4b. Apakah inovasi yang difasilitasi Hub JIPP memperoleh pengakuan atau penghargaan?</b>	Penghargaan secara nasional belum ada, namun diberi penghargaan pada tingkat daerah  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qlgP9gcMB6QoIAWmGoLayS-mZ3nXrDm7">https://drive.google.com/drive/folders/1qlgP9gcMB6QoIAWmGoLayS-mZ3nXrDm7</a>	Pengelola Hub JIPP agar terus mendokumentasikan pengakuan atau penghargaan terhadap inovasi yang telah difasilitasi	3

### DAFTAR PIC KEMENTERIAN PANRB

No	Nama Instansi	Nama PIC
1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Winnie
2	Kejaksaan Agung	Silvia
3	Kementerian Agama	Saldi
4	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Weki
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Monica
6	Kementerian Kesehatan	Anggun
7	Kementerian Keuangan	Novita
8	Kementerian Perdagangan	Yuri
9	Kementerian Perindustrian	Willy
10	Kementerian Pertanian	Aris
11	Kementerian Sosial	Gege
12	Kepolisian RI	Lucia
13	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Ayu Apriyanti/ Aditya
14	Mahkamah Agung	Alfian
15	Perpustakaan Nasional	Anggy
16	Provinsi Aceh	Weki
17	Provinsi Sumatera Utara	Gege
18	Provinsi Sumatera Selatan	Vina/ Rafly
19	Provinsi Sumatera Barat	Rachmat
20	Provinsi Kepulauan Riau	Winnie
21	Provinsi Riau	Willy
22	Provinsi Jambi	Triana
23	Provinsi Bangka Belitung	Silvia
24	Provinsi Bengkulu	Septian/ Syahnas
25	Provinsi Lampung	Monica
26	Provinsi Banten	Rosikin

No	Nama Instansi	Nama PIC
27	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Dona
28	Provinsi Jawa Barat	Rakha
29	Provinsi Jawa Tengah	Tiara
30	Provinsi DI Yogyakarta	Novita
31	Provinsi Jawa Timur	Novika
32	Provinsi Bali	Vilda
33	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Yenni
34	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Faisal
35	Provinsi Kalimantan Barat	Anggy
36	Provinsi Kalimantan Tengah	Teguh
37	Provinsi Kalimantan Utara	Sinta
38	Provinsi Kalimantan Timur	Anggun
39	Provinsi Kalimantan Selatan	Edwin
40	Provinsi Sulawesi Barat	Saldi
41	Provinsi Sulawesi Tengah	Fika
42	Provinsi Sulawesi Selatan	Nanang
43	Provinsi Sulawesi Utara	Sinta
44	Provinsi Sulawesi Tenggara	Faiz
45	Provinsi Gorontalo	Dian Ayu
46	Provinsi Maluku	Sudibyo/ Ichsan
47	Provinsi Maluku Utara	Taufiq
48	Provinsi Papua Barat Daya	Teguh
49	Provinsi Papua	Sugeng
50	Provinsi Papua Barat	Sudibyo/ Ichsan
51	Provinsi Papua Selatan	Silvia